

## Kolaborasi atau Gerakan Masyarakat Sipil? Dilema Inovasi Sosial dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan

Endah Tri Anomsari

Politeknik STIA LAN Bandung  
e-mail: endah.anomsari@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Inovasi sosial merupakan kebaruan yang datang dari masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Tulisan ini merupakan telaah konseptual atas dilema yang dihadapi dalam pengembangan inovasi sosial. Di satu sisi, inovasi sosial dapat dibawa ke arah gerakan masyarakat sipil, yaitu sebagai sebuah perlawanan terhadap hegemoni (*counter-hegemonic*) yaitu struktur atau institusi yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Di sisi lain, inovasi sosial dikembangkan melalui proses kolaborasi dengan pemerintah atau swasta. Dengan kolaborasi, inovasi dapat berkembang dengan lebih pesat, tetapi berpotensi untuk terbawa arus utama sehingga sulit untuk menghasilkan perubahan institusional. Kedua arah pengembangan inovasi tersebut dapat membawa implikasi berbeda terhadap pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** inovasi sosial; pemberdayaan masyarakat; gerakan sosial; masyarakat sipil; kolaborasi

### *Collaboration or Civil Society Movement? The Dilemma of Social Innovation and Its Implications to Empowerment*

#### Abstract

*Social innovation is a new initiative that comes from below to tackle social problems. This paper is a conceptual analysis on the dilemma on the development of social innovation. On the one hand, social innovation can be brought into civil society movement trajectory, as the counter-hegemonic towards the existing structure and institutions that cause social problems. On the other hand, social innovation can be developed as collaboration process with the government and private enterprises. Through collaboration, innovation can be scaled out, but facing the risk of becoming mainstream that it fails to result in institutional change. Both directions may bring different implications to empowerment.*

**Keywords:** social innovation; community empowerment; social movement; civil society; collaboration

#### A. PENDAHULUAN

Inovasi sosial merupakan topik yang banyak muncul dalam pembangunan dan pemberdayaan. Istilah ini memiliki definisi sebagai suatu proses kompleks untuk memperkenalkan produk, proses, atau program baru yang secara signifikan mengubah kebiasaan, sumber daya, kekuasaan, atau kepercayaan dan sistem sosial tempat terjadinya inovasi (Westley et al., 2014). Inovasi yang sukses memiliki daya tahan dan berdampak luas. Dengan persyaratan yang seperti ini, pembahasan

inovasi sosial tidak hanya berhenti pada apa hal baru yang dilakukan, tetapi juga bagaimana dampaknya. Dampak terhadap masyarakat inilah yang membuat inovasi sosial dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial. Wijk et al. (2019) bahkan menyatakan bahwa inovasi sosial merupakan hal yang dibutuhkan segera karena kita menghadapi masalah sosial yang kompleks.

Terdapat studi yang menunjukkan dampak positif inovasi sosial. Bartels (2020) menemukan bahwa inovasi sosial dapat

mendorong ko-produksi perubahan transformatif di perkotaan. Kuncinya ada pada bagaimana memperluas pengaruh dan memastikan keberlanjutan dari inovasi dengan mengubah jejaring relasional yang menyusun ruang dan pemerintahan lokal. Sementara di Brazil, inovasi sosial berkontribusi terhadap keberhasilan gerakan-gerakan sosial penting di sana (Maldonado-Mariscal, 2020). Di Australia, inovasi sosial dalam sektor disabilitas berhasil mendorong pemerintah untuk membentuk skema asuransi disabilitas nasional, setelah gerakan yang dilakukan menghasilkan kenaikan kesejahteraan hidup penyandang disabilitas dan mendorong perubahan pada level institusional (Taylor et al., 2020). Sementara Kumar (2020) meneliti inovasi sosial dalam bentuk sistem intensifikasi penanaman beras di Bihar, India, telah mendorong pembangunan di bidang pertanian.

Meskipun sering berdampak positif, inovasi sosial tidak bisa dilepaskan dari perdebatan, terutama jika dilihat dari perspektif institusional. Tulisan ini merupakan telaah terhadap inovasi sosial, dilema pengembangan, dan implikasinya terhadap pemberdayaan. Analisis ini dapat menjadi referensi bagi inovator sosial untuk mengambil sikap ke depannya.

## B. PEMBAHASAN

### Konseptualisasi dan Dilema Inovasi Sosial

Inovasi sosial merupakan suatu proses kompleks yang memperkenalkan hal baru dan berbeda dari sistem sosial tempat terjadinya inovasi (Westley et al., 2014). Bentuk dari inovasi sosial dapat berupa ide, tindakan, kerangka, model, sistem, proses, layanan, regulasi, dan bentuk organisasi spesifik (Nicholls et al., 2015). Sebuah inisiatif dikatakan sebagai inovasi sosial jika dapat mengatasi permasalahan sosial dan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat (Mumford, 2002). Konseptualisasi inovasi sosial terdiri dari proses sosial yang baru serta hasil dan dampak sosial yang juga baru (Nicholls et al., 2015). Kumar (2020) juga menyimpulkan bahwa terdapat dua penekanan utama dalam inovasi sosial, yaitu: sistem dan proses perubahan hubungan sosial dan

inovasi sebagai ide, produk, dan proses baru yang mengatasi tantangan dan kebuutuhan sosial dan lingkungan.

Menurut Moulaert et al. (2013), hal yang mendorong munculnya inovasi sosial adalah adanya problematika dalam masyarakat yang sulit diatasi dengan cara-cara umum dan terlembagakan. Inovasi sosial datang dari inisiatif masyarakat, sehingga konsepnya berlawanan dengan penyelesaian masalah melalui pendekatan *top-down* atau berasal dari pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, inovasi sosial memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar inovasi. Pengertian inovasi sosial adalah proses kompleks yang memiliki beragam bentuk dan kebaruan, muncul dari dalam masyarakat sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan cara biasa dan terlembagakan, menjadi solusi penyelesaian atas permasalahan tersebut, dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Inovasi sosial ini merupakan konsep yang luas, secara normatif menarik, terdapat konsensus akan manfaat inovasi sebagai upaya menuju perbaikan, dan dapat dipasarkan secara global (Bragaglia, 2021).

Inovasi sosial juga dapat dilihat dari perspektif institusional. Insititusalisme merupakan suatu teori tentang aspek mendalam yang membentuk struktur sosial masyarakat, termasuk di dalamnya aturan, norma, dan pranata formal dan nonformal yang membentuk perilaku dan struktur sosial masyarakat. Perubahan sosial yang diharapkan menjadi dampak dari inovasi sosial terkait dengan perubahan institusi dan struktur sosial ini. Idealnya, kondisi yang diinginkan adalah adanya perubahan pranata dan struktur menjadi lebih adil dan inklusif bagi semua orang.

Banyak studi mengeksplorasi manfaat atau dampak inovasi sosial, seperti Bartels (2020) yang berfokus pada ko-produksi dalam mendorong perubahan transformatif di perkotaan, Maldonado-Mariscal (2020) tentang kontribusi inovasi sosial dalam mewujudkan perubahan sosial di Brazil, dan Taylor, Torugsa, dan Arundel (2020) tentang inovasi dalam sektor disabilitas di Australia yang berhasil meningkatkan taraf hidup penyandang

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi  
Era Society 5.0

disabilitas dan menghasilkan perubahan institusional dengan mendorong dikeluarkannya skema asuransi disabilitas nasional.

Ruang lingkup dan skala dari dampak masing-masing inovasi sosial berbeda-beda dalam setiap konteks. Secara konseptual, dampak tersebut dapat dilihat berdasarkan level inovasi yang diutarakan oleh Nicholls dan Murdock (2012 dalam (Nicholls et al., 2015)), yaitu: inovasi mengatasi dampak negatif mekanisme pasar, menawarkan suatu alternatif baru, dan mengubah struktur sosial. Meskipun demikian, evaluasi sistematis terhadap efektivitas dan hasil empiris dari sebuah inovasi sosial masih dirasa kurang (Milley et al., 2018). Inovasi sosial tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Moulaert et al. (2005), terhadap tiga prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu inovasi sosial berhasil, yaitu: (1) kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan dasar, (2) transformasi sosial (perubahan hubungan sosial menjadi lebih inklusif), dan (3) pemberdayaan sosial-politik atau mobilisasi. Inovasi sosial dapat dikatakan berhasil bukan hanya jika sudah memenuhi kebutuhan dasar (kesejahteraan individu), tetapi berdampak lebih luas terhadap adanya perubahan sosial dan bahkan mobilisasi yang berujung pada perubahan institusional. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana untuk menuju inovasi sosial yang memenuhi ketiga prasyarat ini. Pertanyaan tersebut membawa kita pada dilema tentang apa dan bagaimana inovasi sosial harus dilakukan dan diarahkan ke depannya. Terdapat dua arah dalam pengembangan inovasi sosial. Pertama, inovasi sosial sebagai kolaborasi *multi-stakeholders*. Kedua, inovasi sosial sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil.

**Inovasi Kolaboratif: Shared Values and Resources**

Meskipun merupakan inisiatif masyarakat dan merupakan ekspresi penyelesaian permasalahan sosial menggunakan pendekatan *bottom-up*, pelaksanaan inovasi sosial tidak harus sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat sipil di sini memang

bukan merupakan entitas tunggal, tetapi secara luas dapat diartikan sebagai aktor di luar pemerintah atau swasta. Pada melakukan inovasi, masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah atau swasta. Kolaborasi sering dianggap sebagai jawaban atas kendala yang sering dihadapi oleh para inovator sosial, khususnya di level akar rumput, yaitu keterbatasan pengetahuan, kapasitas, dan sumber daya. Dengan kerjasama, inovasi sosial dapat lebih dikembangkan menggunakan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Selain berbagi sumber daya, dalam proses kolaborasi dibutuhkan adanya keterbukaan informasi dan pandangan. Dari proses kerjasama, akan muncul nilai-nilai yang disepakati bersama (*shared values*), terutama jika inovasi tersebut berbentuk wirausaha sosial. Shaw dan de Bruin (2013) mengutarakan bahwa wirausaha sosial yang terbuka terhadap *shared values* berpotensi lebih besar untuk berhasil melakukan *scale up* (berkembang ke level yang lebih tinggi) daripada program-program lain yang lebih murni sosial. Program yang terbuka terhadap *shared values* juga dapat menjadi katalis kerjasama *multi-stakeholders* yang memberi dampak lebih besar dengan biaya lebih kecil (Shaw & de Bruin, 2013). Dengan kolaborasi, inovasi sosial dapat memperoleh sumberdaya, dukungan, dan pengetahuan yang lebih dari apa yang dimiliki oleh masyarakat sipil sendiri.

Inovasi sosial biasanya mulai dari level lokal, kemudian setelah berhasil di level tersebut dilakukan proses *scale-out* (penyebaran) di tempat lain (Westley et al., 2014). Pada level penyebaran seperti ini, inovator memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan reputasi, tetapi inovasi belum menyelesaikan akar masalah. Penyelesaian akar masalah membutuhkan perubahan sistemik terhadap institusi yang sosial, ekonomi, politik, atau hukum. Jika inovasi sosial dikembangkan dengan sektor swasta dan pemerintah, perubahan sistemik ini relatif lebih sulit dilakukan, karena proses perubahan tersebut akan menyentuh kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Sering terjadi sebuah inisiatif sukses di level lokal, tetapi usaha



untuk melakukan *scale up* menjadi *mainstream* gagal karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung (Bartels, 2020).

### **Inovasi sebagai Gerakan Masyarakat Sipil: Menuju Perubahan Sosial**

Salah satu yang menunjukkan sulitnya melakukan perubahan institusional melalui inovasi sosial adalah perbedaan antara visi sosial dan bisnis atau mekanisme pasar. Sektor bisnis yang pada dasarnya berorientasi profit, memiliki landasan ideologis yang berbeda dengan inovasi sosial yang nonprofit. Seringkali inovasi sosial ini justru muncul karena adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dan adil bagi semua orang. Kedekatan inovasi sosial dengan bisnis dapat menyebabkan inovasi sosial menguatkan hegemoni neoliberal dengan cara me-relegitimasi diskursus neoliberalisme (Fougère et al., 2017).

Arah lain yang dapat dituju oleh inovator sosial adalah menjaga inovasi sebagai gerakan masyarakat sipil. Inovasi dilihat dari perspektif Gramsci, yaitu sebagai "kekuatan yang menentang *status-quo* dengan membentuk tata tertib sosial baru" (Pribadi, 2017, p. 24). Gerakan masyarakat sipil bersifat *counter-hegemonic* (melawan hegemoni) karena dalam tatanan masyarakat saat ini, pemegang hegemoni adalah pemerintah dan pemilik modal. Dalam perspektif Gramsci, inovasi sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam rangka mengubah struktur atau institusi yang selama ini menjadi penyebab munculnya masalah sosial atau paling tidak menjadi hambatan dalam melakukan perubahan sosial yang berpihak pada rakyat.

Dengan permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan banyak berkaitan dengan aktor dan sistem yang saling terhubung (van Wijk et al., 2019), melakukan inovasi sosial melibatkan re-negosiasi dari pranata yang sudah ada dan membangun pranata yang baru. Agar inovasi sosial dapat membawa perubahan yang lebih berarti, inovasi sosial perlu menantang tatanan yang ada. Van Wijk et al. (2019) menawarkan tiga tahap dalam melakukan perubahan sosial melalui

inovasi. Pertama, pada level mikro, individual yang terlibat dalam inovasi sosial dapat menjadi semakin berdaya dengan interaksinya dengan orang lain. Mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman emosional yang sama, kemudian merefleksikan hal tersebut untuk menemukan cara pandang dan ide baru. Kedua, pada level meso, kelompok individual tadi semakin membesar dengan anggota yang lebih majemuk. Interaksi dan pemahaman antarindividual dalam level meso semakin berkembang, sehingga akan tercipta suatu ruang interaktif. Dalam ruang interaktif inilah, kelompok masyarakat dapat menggali ide untuk penyelesaian masalah sosial yang mereka hadapi. Ketiga, pada level makro, inovasi sosial akan berhadapan dengan konteks institusional. Inovasi sosial dapat didorong atau dihambat oleh sistem sosial, politik, ekonomi yang ada.

Meskipun terdengar ideal, mencapai level tersebut tidaklah mudah. Inovator sosial perlu untuk memiliki pemahaman akan konteks institusional dan mengintegrasikan cara aktor bekerja dan berinteraksi. Itu pun membutuhkan proses panjang, karena perubahan pranata di balik permasalahan sosial yang kompleks memang tidak dapat diubah dengan cepat (van Wijk et al., 2019).

### **Implikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai perluasan dan terkait dengan istilah otonomi, kemandirian arah dan determinasi, kebebasan, partisipasi, mobilisasi, dan rasa percaya diri (Ibrahim & Alkire, 2007). Alsop et al. (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan meliputi dua komponen, yaitu: perluasan agensi (*agency expansion*) dan struktur peluang (*opportunity structure*). Perluasan agensi merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan nilai yang dijunjung, sementara struktur peluang merupakan struktur atau pranata sosial yang memberikan peluang bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Pengertian pemberdayaan sebagai perluasan agensi dan struktur peluang ini dekat sekali dengan definisi inovasi sosial sebagai tindakan baru menuju

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi  
Era Society 5.0

perubahan terhadap agenda, agensi, dan pranata yang berdampak pada inklusivisme di dalam masyarakat (Moulaert & Hillier, 2007). Dengan demikian, inovasi sosial dapat dipandang sebagai bagian dari proses memberdayakan masyarakat.

Dua arah atau trajektori inovasi sosial yang menjadi dilema dapat membawa implikasi yang berbeda terhadap pemberdayaan masyarakat. Dilihat pada trajektori pertama, jika inovasi sosial kemudian dikembangkan menjadi kolaborasi, inisiatif dapat memperoleh dukungan material dan immaterial. Dukungan ini dapat membuat suatu inisiatif bertahan lama dan dapat mendukung proses pemberdayaan sebagai perluasan agensi. Namun, jika dikaitkan dengan perubahan struktur sosial yang ada, hal ini lebih sulit diwujudkan karena pihak yang berkolaborasi dapat berbeda kepentingan. Jika inovasi yang kolaboratif ingin berdampak terhadap perubahan sosial, masing-masing pihak perlu untuk menemukan *shared value*. Ini sulit untuk dilakukan, terutama jika berkaitan dengan pihak swasta yang memang berorientasi profit dan secara alamiah berbeda dengan inovasi sosial yang berfokus pada penyelesaian masalah masyarakat.

Trajektori satunya, inovasi sebagai gerakan sosial berpotensi untuk membawa perubahan sosial karena dapat memberikan tekanan (*pressure*) kepada pemegang hegemoni. Misalnya di Hong Kong, koperasi pekerja (*workers co-operative*) bergerak dalam memberikan penetrasi terhadap struktur sosial-ekonomi Hong Kong yang neoliberal (Dai et al., 2019). Namun, mendorong perubahan institusional bukan hal yang mudah, apalagi inovasi yang murni hanya dilakukan oleh masyarakat cenderung memiliki sumber daya terbatas. Tekanan yang dihasilkan pun kurang terasa. Untuk melakukan *scale up* dan mengubah pranata yang ada, dibutuhkan solidaritas masyarakat dalam melakukan gerakan kolektif yang besar sehingga tekanan yang dihasilkan pun cukup besar untuk menghasilkan *opportunity structure*.

Schiller-Merkens (2020) berargumen apa yang dapat dilakukan untuk membantu

inovasi sosial untuk melakukan *scale-up*, yaitu dengan menarget atau memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mewujudkan transformasi sosial melalui perubahan regulasi, menggunakan kekuatan media massa untuk menggalakkan dukungan dan mobilisasi, serta mempertemukan aktor-aktor dalam masyarakat yang memiliki kesamaan visi dan nilai untuk bergerak bersama mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan.

Kesuksesan *scale-up* inovasi sosial pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Menurut Westley et al. (2014), hal yang turut berpengaruh adalah kondisi awal inovasi sosial dilakukan apakah kondusif atau tidak untuk melakukan perubahan, kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh inovator, hambatan dan peluang yang dihadapi oleh inovasi tersebut, dan yang lebih utama adalah perlunya ada kesadaran dalam internal para inovator bahwa melakukan *scale-up* sampai menghasilkan perubahan sosial yang lebih berarti seringkali harus meninggalkan tatanan lama. Selain itu, keahlian yang dibutuhkan dalam melakukan inovasi sosial di level lokal dan inovasi sosial yang berdampak institusional cukup berbeda (Westley et al., 2014). Untuk menghasilkan perubahan institusional, inovasi sosial membutuhkan sosok pemimpin dapat bergerak dan menggerakkan orang lain dalam level yang lebih tinggi.

Banyaknya hal yang berpengaruh dalam inovasi sosial menunjukkan mengapa selama ini hanya ada sedikit inovasi yang berhasil membawa perubahan sosial yang masif, sekaligus menunjukkan di bagian apa para inovator sosial perlu untuk memperbaiki diri apabila berniat untuk membawa inovasinya ke proses *scale-up*. Meskipun sulit, dua arah inovasi sosial berpotensi membawa dampak positif tersendiri bagi pemberdayaan masyarakat. Sebagai kolaborasi, inovasi berpotensi mensejahterakan masyarakat dengan sasaran adalah perluasan agensi. Sementara sebagai gerakan masyarakat sipil, inovasi berpotensi menjadi penggerak perubahan sosial, dengan sasaran membentuk *opportunity structure*.

### C. PENUTUP

Inovasi sosial merupakan suatu kebaruan yang berasal dari masyarakat sebagai respons atas permasalahan sosial yang ada dan sulit diselesaikan oleh cara-cara biasa. Dalam pengembangan inovasi sosial, para inovator menghadapi sebuah dilema. Di satu sisi, inovasi sosial dapat dikembangkan sebagai kegiatan kolaborasi dengan swasta dan pemerintah. Proses kolaboratif ini dapat mendukung pemberdayaan masyarakat sebagai perluasan agensi, tetapi sulit untuk melakukan perubahan institusional. Di sisi lain, inovator sosial dapat membawa inovasinya sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil yang bersifat *counter-hegemonic*. Inovasi sosial dengan arah ini menargetkan terjadinya perubahan terhadap struktur dan pranata sosial, ekonomi, atau politik yang selama ini menyebabkan berbagai permasalahan sosial atau menghambat penyelesaian masalah sosial. Menentukan arah mana yang lebih tepat dan lebih berpotensi untuk berhasil bukan hal mudah, karena ada berbagai faktor yang menentukan apakah inovasi sosial akan berhasil membawa perubahan institusional, mulai dari kondisi awal, sumber daya, kondisi struktur yang ada, dan bagaimana sikap dari pihak yang terlibat dalam inovasi itu sendiri.

### REFERENSI

- Alsop, R., Bertelsen, M., & Holland, J. (2006). *Empowerment in Practice From Analysis to Implementation*.
- Bartels, K. (2020). Transforming the relational dynamics of urban governance: How social innovation research can create a trajectory for learning and change. *Urban Studies*, 57(14), 2868–2884. <https://doi.org/10.1177/0042098019889290>
- Bragaglia, F. (2021). Social innovation as a 'magic concept' for policy-makers and its implications for urban governance. *Planning Theory*, 20(2), 102–120. <https://doi.org/10.1177/1473095220934832>
- Dai, H., Lau, Y., & Lee, K. H. (2019). Social Innovation, Value Penetration, and the Power of the Nonprofit Sector: Workers' Co-Operative Societies in Hong Kong. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 48(6), 1210–1228. <https://doi.org/10.1177/0899764019863107>
- Fougère, M., Segercrantz, B., & Seeck, H. (2017). A critical reading of the European Union's social innovation policy discourse: (Re)legitimizing neoliberalism. *Organization*, 24(6), 819–843. <https://doi.org/10.1177/1350508416685171>
- Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007). Agency and empowerment: A proposal for internationally comparable indicators. *Oxford Development Studies*, 35(4), 379–403. <https://doi.org/10.1080/13600810701701897>
- Kumar, V. (2020). Social Innovation for Agricultural Development: A Study of System of Rice Intensification in Bihar, India. *Millennial Asia*, 11(1), 99–118. <https://doi.org/10.1177/0976399619900615>
- Maldonado-Mariscal, K. (2020). Social Change in Brazil Through Innovations and Social Movements. *Journal of Developing Societies*, 36(4), 415–438. <https://doi.org/10.1177/0169796X20963332>
- Milley, P., Szijarto, B., Svensson, K., & Cousins, J. B. (2018). The evaluation of social innovation: A review and integration of the current empirical knowledge base. *Evaluation*, 24(2), 237–258. <https://doi.org/10.1177/1356389018763242>
- Moulaert, F., & Hillier, J. (2007). *What is social innovation? And why is it politically relevant?*
- Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2013). General introduction: the return of social innovation as a scientific concept and a social practice. In A. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood, & A.



- Hamdouch (Eds.), *The international handbook on social innovation* (pp. 1–6).
- Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., & González, S. (2005). Towards Alternative Model(s) of Local Innovation. *Urban Studies*, 42(11), 1969–1990.
- Mumford, M. D. (2002). Social innovation: Ten cases from Benjamin Franklin. *Creativity Research Journal*, 14(2), 253–266.  
[https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1402\\_11](https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1402_11)
- Nicholls, A., Simon, J., & Gabriel, M. (2015). Introduction: Dimensions of Social Innovation. In A. Nicholls, J. Simon, & M. Gabriel (Eds.), *New Frontiers in Social Innovation Research* (pp. 1–28). Palgrave MacMillan.
- Pribadi, R. E. (2017). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 917–932.
- Schiller-Merkens, & Simone. (2020). A Service of zbw Leibniz- Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics Standard-Nutzungsbedingungen.  
<http://hdl.handlewww.econstor.eu>
- Shaw, E., & de Bruin, A. (2013). Reconsidering capitalism: The promise of social innovation and social entrepreneurship? *International Small Business Journal*, 31(7), 737–746.  
<https://doi.org/10.1177/0266242613497494>
- Taylor, R., Torugsa, N., & Arundel, A. (2020). Social Innovation in Disability Nonprofits: An Abductive Study of Capabilities for Social Change. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 49(2), 399–423.  
<https://doi.org/10.1177/0899764019873965>
- van Wijk, J., Zietsma, C., Dorado, S., de Bakker, F. G. A., & Martí, I. (2019). Social Innovation: Integrating Micro, Meso, and Macro Level Insights From Institutional Theory. *Business and Society*, 58(5), 887–918.  
<https://doi.org/10.1177/0007650318789104>
- Westley, F., Antadze, N., Riddell, D. J., Robinson, K., & Geobey, S. (2014). Five Configurations for Scaling Up Social Innovation: Case Examples of Nonprofit Organizations From Canada. *Journal of Applied Behavioral Science*, 50(3), 234–260.  
<https://doi.org/10.1177/0021886314532945>